

improvements to the natural environment as well as improving the socio-economic life of people around the company. The purpose of this study was to determine the role of Public Relations of PT. Sari Lembah Subur in the implementation of CSR programs in addressing the problem of forest fires and to determine the factors supporting and inhibiting factors in the implementation of CSR programs in Sub Kerumutan forest fires. Messages narrative in this study is "Forest burning heartless and let not got the guts ". Furthermore, the subject of this research is Public Relations of PT. Sari Lembah Subur and communities in District Kerumutan. The strategy used by the Public Relations of PT. Sari Lembah Subur is implementing CSR programs together through AKLIMASI program in addressing the problem of forest fires in Sub Kerumutan. The purpose of the program is to raise awareness of all parties would be a concern for the natural environment and social environment.

Keywords: The Role of Public Relations, Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hutan merupakan kekayaan yang di kuasai oleh Negara dan sebagai salah satu penyangga kehidupan rakyat, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib di sukuri, di urus, dan manfaatkan secara optimal serta

dijaga kelestariannya untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi akan datang yang di anugerahkan kepada Negara Indonesia.

Hutan memiliki fungsi ekologi yang sangat penting bagi ekosistem alam, di samping itu hutan juga merupakan salah satu potensi ekonomi yang sangat besar, oleh karena itu perlu di kelola secara lestari.

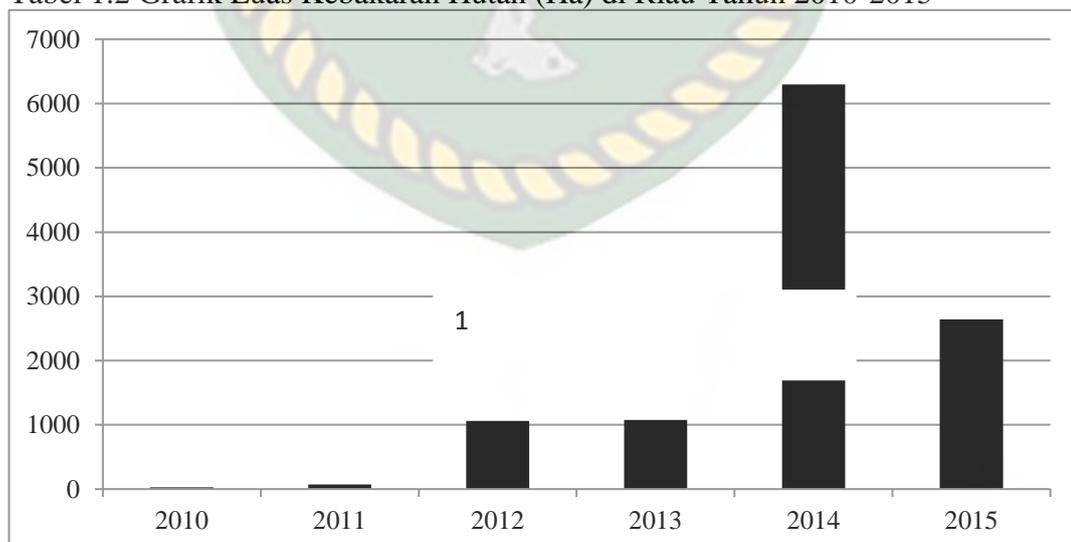
Keberadaan hutan di Indonesia terus mengalami kerusakan, yang di maksud dengan kerusakan hutan yaitu terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Tabel 1.1 luas kebakaran hutan (Ha) di Riau tahun 2010-2015

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Luas (Ha)	26,00	74,50	1.060,00	1.077,50	6.301,10	2.643,00

Sumber: [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran)

Tabel 1.2 Grafik Luas Kebakaran Hutan (Ha) di Riau Tahun 2010-2015



Sumber : [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran)

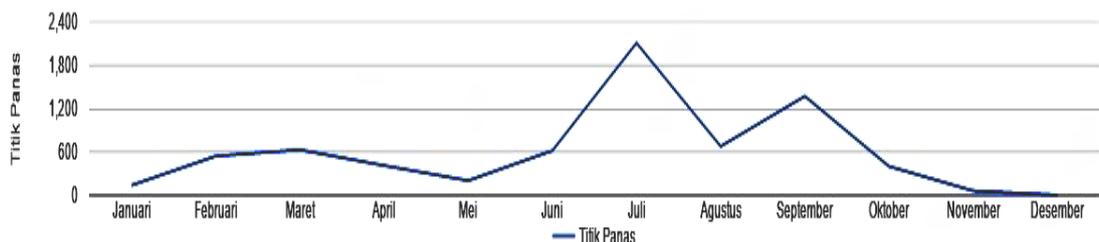
Aplikasi ini adalah untuk mengantisipasi dan melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dengan lebih cepat. “Agar dapat meminimalisir kebakaran hutan,” Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, di kantornya Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis, (12 maret 2015), dikutip dari tempo.co.

Aplikasi SiPongi merupakan aplikasi yang berbasis data satelit NOAA dan Tera, serta alat itu pun dibantu oleh cahaya matahari. Ia menambahkan, cara kerjanya pun cukup simple, dimana satelit akan menangkap suhu dan luasan titik api lalu disampaikan ke pusat informasi dan akan ditampilkan ke website resmi.

Selain titik api, aplikasi ini juga dapat menampilkan kualitas udara. Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam KLHK, Sonny Partono mengungkapkan aplikasi ini memiliki 2 tampilan, yakni masyarakat bisa membukanya, dan yang kedua untuk pihak Internal KLHK dengan unit-unit terkait dalam permasalahan kebakaran hutan.

Dari tabel di atas dapat di lihat luas kebakaran hutan di Riau selama kurun waktu 5 tahun, hal tersebut juga bisa di lihat dari data titik api di Riau tahun 2015 sebagai berikut.

Tabel 1.3 Data Matrik Titik Panas pada 11 Provinsi  
Tahun: 2015, Provinsi: Riau



No	Kab/Kota	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	des
1	Bengkalis	41	277	353	157	37	69	354	38	37	22	12	3
2	Dumai	0	12	19	19	4	23	103	6	8	0	0	0
3	Indragiri Hilir	15	37	17	29	21	52	167	144	171	105	11	1
4	Indragiri Hulu	17	2	0	11	10	53	234	181	369	136	5	1
5	Kampar	4	3	5	15	12	27	107	46	123	0	4	0
6	Kepulauan Meranti	4	37	76	16	11	13	36	7	4	51	5	1
7	Kuantan Singingi	11	1	0	2	0	20	53	14	50	9	0	0
8	Pekanbaru	0	0	2	0	0	0	7	3	0	0	0	0
9	Pelalawan	45	77	82	74	67	185	464	152	508	45	21	0
10	Rokan hilir	0	31	28	10	8	114	359	30	20	0	0	0
11	Rokan Hulu	1	7	13	1	3	15	45	7	23	2	0	0
12	Siak	4	61	37	81	34	49	167	42	56	33	7	2

Sumber : [http://sipongi.menlhk.go.id/home/karhutla\\_monitoring\\_system](http://sipongi.menlhk.go.id/home/karhutla_monitoring_system)

Bentuk kerusakan hutan yang terjadi di wilayah Pt. Sari Lembah Subur kecamatan kerumatan di sebabkan karena maraknya pembakaran hutan dan lahan, Setiap tahun di musim kemarau selalu saja terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dituding sebagai biang keladi pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini. pembakaran merupakan cara yang paling murah untuk membuka lahan perkebunan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab walaupun sangat dilarang pemerintah. Kondisi ini mendorong PT. Sari Lembah Subur (PT.SLS), anak perusahaan PT Astra Argo Lestari TBK yang beroperasi di kabupaten pelalawan, Provinsi Riau, mengajak warga sekitar dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.

sehingga pada akhirnya peran yang diharapkan akan dilakukan Humas itu bisa terwujud. Dalam praktek, status dan besarnya perusahaan tidak otomatis diikuti oleh kesadaran untuk menyelenggarakan fungsi Humas pula. Perusahaan

besar tidak selalu berarti memiliki departemen Humas yang besar pula. Banyak perusahaan besar yang ternyata memiliki departemen Humas yang kecil. Sebaliknya, perusahaan yang relatif kecil ternyata mempekerjakan banyak staf Humas, dan bahkan bagian Humas itu masih pula dibantu oleh konsultan Humas dari luar organisasi. Morison, seorang pakar Humas, dengan sangat tepat menguraikan kedudukan Humas dalam konteks organisasi/perusahaan. Menurutnya, ada tiga hal yang turut menentukan, eksistensi departemen Humas pada setiap perusahaan yaitu: Pertama, ukuran organisasi atau perusahaan itu sendiri. Suatu perusahaan kecil mungkin tidak terlalu membutuhkan unit humas tersendiri karena fungsi itu mungkin bisa dirangkap bagian lain. Pada beberapa organisasi tertentu fungsi Humas langsung dirangkap oleh salah seorang Direkturnya. Namun suatu perusahaan besar yang memiliki hubungan dengan khalayak luas sudah cukup membutuhkan suatu departemen Humas tersendiri dengan staf lengkap. Kedua, nilai atau arti penting fungsi Humas bagi manajemen. Besar kecilnya departemen Humas terkadang dipengaruhi oleh pengetahuan atau kebutuhan pimpinan perusahaan terhadap peran Humas bagi kepentingan organisasi atau perusahaan. Suatu perusahaan keluarga atau perusahaan milik pribadi yang cenderung tertutup, biasanya tidak merasa terlalu membutuhkan fungsi Humas, walaupun ada, hanya kecil saja. Kondisi ini berbeda dengan perusahaan terbuka yang sudah go public, yang harus lebih transparan, sehingga membutuhkan fungsi humas yang lebih aktif. Disini, pemahaman dan penghayatan pucuk pimpinan terhadap keberadaan Humas sebagai pendukung lini strategis organisasi tentu menjadi sangat menentukan. Ketiga, karakteristik

organisasi atau perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki kebutuhan tersendiri yang tidak bisa diseragamkan dengan kebutuhan perusahaan lain. Perusahaan pembuat produk konsumen yang bersifat massal, semisal: sabun, shampo atau makanan, pasti lebih mengarahkan dana untuk keperluan periklanan, dan tidak terlalu mementingkan Humas. Hal ini berbeda dengan perusahaan industri yang bersifat teknis misalnya perusahaan yang membuat produk hasil teknologi baru atau perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, reksadana, investasi dan sebagainya yang akan lebih mementingkan kegiatan-kegiatan Humas. Humas sebagai fungsi manajemen bagi organisasi tentu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ketiga hal ini, bisa menjelaskan mengapa pada suatu organisasi/perusahaan tidak ditemukan departemen Humas, sementara pada organisasi lainnya, Humas menjadi suatu departemen yang sangat berpengaruh dan penting.

*Corporate Sosial Responsibility* merupakan suatu tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat lokal. *Implementasi Corporate Sosial Responsibility* harus menjadi bagian penting dalam peran bisnis dan termasuk dalam kebijakan bisnis perusahaan, sehingga dunia bisnis bukan hanya merupakan suatu organisasi yang berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga memiliki kesadaran sosial pada lingkungan sosial dimana perusahaan berada. Secara teoretis *Corporate Sosial Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR) merupakan inti dari etika bisnis, di mana suatu perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal kepada pemegang saham (shareholder), tetapi perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang

berkepentingan (stakeholder). Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Jadi CSR lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas (stakeholders) daripada hanya sekadar kepentingan perusahaan itu sendiri CSR itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (customers), karyawan (employers), komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok, (supplier) serta kompetitornya sendiri (Azheri, 2012:5).

Pelaksanaan CSR diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 tentang kewajiban CSR bagi Perseroan Terbatas (PT) dijelaskan bahwa industri atau korporasi wajib melaksanakan CSR, tetapi bukan sebagai beban yang memberatkan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan keputusan pemerintah tentang CSR bagi Perseroan Terbatas (PT) dan tertuju pada pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang kewajiban CSR bagi PT, yaitu :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Konsep CSR yang sudah ada diharapkan menjadi suatu pembangunan masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang yaitu di bidang ekonomi (*Commission on Environment and Development*) hal ini dilakukan agar implementasi dari konsep-konsep CSR yang sudah ada tidak berhenti disatu titik tetapi konsep-konsep CSR yang sudah ada menjadi suatu kegiatan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dari tahun ke tahun, untuk melaksanakan konsep CSR dengan pandangan *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) tentunya suatu perusahaan atau lembaga sosial harus mampu melibatkan masyarakat atau harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat yang berorientasi pada pemecahan masalah-masalah perekonomian dengan upaya melakukan pemberdayaan secara merata keseluruh masyarakat sekitar baik yang tinggal di sekitar perusahaan atau lembaga sosial.

Pemberdayaan masyarakat itu sendiri merupakan sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya (Soetomo, 2011:69). Dalam hal ini biasanya perusahaan mengutus perwakilan dari

perusahaan yaitu seorang pejabat *public relations* yang sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan yang diwakilinya dengan stakeholder atau publik eksternal perusahaan. Dalam hal ini seorang public relations harus mencermati serta melakukan tahapan-tahapan dari proses pemberdayaan. Mulai dari tiap identifikasi masalah dan kebutuhan sampai ke perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menarik manfaat hasil pembangunan.

dikarenakan kurang pemerataan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan CSR. Mulai dari penekanan yang paling penting berdasarkan hal diatas yaitu perusahaan atau lembaga sosial harus mampu memberdayakan masyarakat melalui kegiatan CSR dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan merata. Komunitas masyarakat tempatan terutama yang berdomisili di Pangkalan Tampoi, desa Tanjung Kuyo memiliki kemampuan ekonomi dan penguasaan keterampilan khusus yang sangat rendah. Untuk menopang hidup, mereka melakukan aktifitas berbasis alam, antara lain sebagai buruh pengumpul kayu dan nelayan. Secara ekonomi masing-masing kegiatan itu belumlah dapat menopang kebutuhan hidup mereka, sehingga cukup banyak anggota masyarakat berprofesi ganda dengan melakoni berbagai kegiatan agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi.

Tim pemadam TNI dari kesatuan Kostrad, Polri, dan manggala Agni terus berjibaku melawan kebakaran di daerah yang dilindungi Negara. “Kebakaran di kerumutan sudah terjadi sejak awal Oktober 2015. Sampai sekarang masih berlangsung (30 oktober 2015). Kita bersama TNI dan Polri terus berupaya menjinakkan api,” ucap kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Pelalawan Hadi Penandio. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kebakaran di daerah Kerumutan seperti disengaja. Ini karena tim pemadam menemukan jalan ke areal hutan yang saat ini terjadi kebakaran. "Akses menuju hutan tersebut sangat terbatas. Jadi ada keanehan karena kebakaran justru muncul dari bagian dalam areal hutan kerumutan yang jalan masuk ke sana sangat sulit," katanya. Sepanjang jalan setapak yang sudah dibuka perambah sepanjang sekitar 10 kilometer menuju area perkebunan, tampak pondok-pondok atau barak milik perambah. Saat melihat petugas, para perambah seperti cuek dan tetap melakukan aktivitas. Di beberapa area Suaka Margasatwa Kerumutan yang pada tahun 2014 terbakar, kini sudah ada tanaman kelapa sawit yang berumur sekitar satu tahun. Tanaman kelapa sawit tersebut tumbuh subur di antara tunggul kayu hutan yang menghitam akibat terbakar. Sementara kondisi kawasan yang terbakar ini sangat berdekatan dengan perkebunan sawit 'siluman' itu. Menurut warga, areal tersebut merupakan milik sebuah koperasi. Luasan hamparan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai koperasi tersebut mencapai ribuan hektare. Sampai saat ini belum diketahui pasti siapa cukong (pemodalnya). "Setahu saya, pada tahun 2014, kasus kebakaran di sana sudah ditangani oleh Polres Pelalawan. Saat itu mereka tertangkap tangan dengan barang bukti enam alat berat," tambah Kepala Bidang Konservasi Wilayah I Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Jhony Lagawurin. Kerumutan ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai kawasan konservasi suaka sejak tahun 1979, dengan luas sekitar 120.000 hektare. Namun kini sebagian besar kawasan porak-poranda akibat pembakaran dan penjarahan massal, (sindo news.com, jum'at 30 oktober 2015).

Meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan kanker paru-paru. Hal ini bisa menyebabkan kematian bagi penderita berusia lanjut dan anak-anak. Polusi asap ini juga bisa menambah parah penyakit para penderita TBC/asma. Asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat antara lain pendidikan, agama dan ekonomi. Banyak sekolah yang terpaksa diliburkan pada saat kabut asap berada di tingkat yang berbahaya. Penduduk dihimbau tidak bepergian jika tidak ada keperluan mendesak. Hal ini mengganggu kegiatan keagamaan dan mengurangi kegiatan perdagangan/ekonomi. Gangguan asap juga terjadi pada sarana perhubungan/transportasi yaitu berkurangnya batas pandang. Banyak pelabuhan udara yang ditutup pada saat pagi hari di musim kemarau karena jarak pandang yang terbatas bisa berbahaya bagi penerbangan. Sering terjadi kecelakaan tabrakan antar perahu di sungai-sungai, mobil kecelakaan, mobil masuk parit, karena terbatasnya jarak pandang. Masalah lain yang berhubungan langsung dengan PT.Sari Lembah Subur seperti adanya kebakaran yang sampai ke lahan PT.Sari Lembah Subur sehingga membuat kerusakan pada pokok sawit, banyak karyawan yang mengeluh akibat asap seperti sesak nafas, mata pedih dan lain sebagainya, masalah masalah tersebut menimbulkan efek menurunnya kualitas karyawan, Memperhatikan peristiwa kebakaran hutan sangat sering terjadi di wilayah ini, dan dampak yang di timbulkan. Maka PT. SLS melakukan berbagai program CSR diantaranya yaitu sosialisasi kebakaran hutan.

Berdasarkan realitas berbagai masalah sosial di atas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana PT. Sari Lembah Subur (PT. SLS) Pelalawan

melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat, yaitu masalah kebakaran lahan dan hutan yang ada di kerumutan. Maka penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang “Peran Humas PT. Sari Lembah Subur Dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* kebakaran hutan di Kecamatan Kerumutan”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas maka identifikasi masalah Peran Humas PT. Sari Lembah Subur Dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Kecamatan Kerumutan sebagai berikut :

1. peran humas *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam pelaksanaan program kebakaran hutan kepada masyarakat.
2. hambatan peran humas *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam mensosialisasikan tentang kebakaran hutan yang ada di Kecamatan Kerumutan.

## **C. Fokus Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka peneliti hanya memfokuskan masalah tentang :

1. Bagaimana peran Humas dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* program kebakaran hutan kepada masyarakat?

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah tentang :

1. Bagaimana peran humas *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dalam pelaksanaan program kebakaran hutan kepada masyarakat?
2. Apa saja faktor yang menghambat peran humas *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dalam mensosialisasikan tentang kebakaran hutan yang ada di Kecamatan Kerumutan?

## **E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti adalah :

- a. Untuk mengetahui sosialisasi dan peran humas CSR dalam pelaksanaan kebakaran hutan kepada masyarakat.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat peran humas dalam mensosialisasikan CSR kebakaran hutan yang ada di Kecamatan Kerumutan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan agar memberikan manfaat berguna bagi beberapa pihak, antara lain :

- a. Teoritis

Sebagai sumber ilmu yang dapat dipelajari oleh penulis dan pembaca, member informasi kepada para pembaca terhadap penelitian ini dan bisa dijadikan referensi bagi peneliti lainnya.

- b. Praktis

Diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi perusahaan terutama sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan erat dengan peran humas dalam meningkatkan program CSR.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **D. Kajian Literatur**

##### **1. Pengertian Komunikasi**